



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Jemur Andayani I Telp. (031) 8477551 Fax (031) 8477404 Kode Pos: 60236
website: bkd.jatimprov.go.id email: bkdjatim@gmail.com

SURABAYA

Surabaya, 10 Maret 2022

Nomor : 860/ 1670 /204.3/2022
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) set berkas
Hal : Penilaian Kinerja Tahun 2021
dan Penyusunan SKP Tahun
2022

Yth. Kepala Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Provinsi
Jawa Timur
di

TEMPAT

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara yang mencabut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyusunan dan penilaian SKP Tahun 2021 periode 2 tetap mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 dan agar diselesaikan serta diupload pada aplikasi SI-Master paling lambat 11 Maret 2022;
2. Berdasarkan progress laporan SKP Tahun 2021 sampai dengan saat ini yang sudah mengupload SKP Tahun 2021 sebanyak 27.770 PNS (63,88%) dari jumlah keseluruhan PNS sebanyak 43.475 PNS;
3. Perangkat Daerah diwajibkan menyelesaikan penilaian kinerja Tahun 2021 pada aplikasi SI-Master dan Penyusunan SKP Tahun 2022 sebagai salah satu syarat pembayaran TPP-PK Tahun 2022;
4. Penyusunan SKP Tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 dengan tetap melanjutkan mengisi Rencana Kinerja dan Indikator Kinerja Individu pada aplikasi SI-Master;
5. Beberapa perubahan pejabat penilai dan atasan pejabat penilai dalam penandatanganan SKP yaitu :

1. Fungsional Terampil . . .

NO.	JABATAN	PEJABAT PENILAI / ATASAN LANGSUNG	ATASAN PEJABAT PENILAI
1.	Fungsional Terampil, Fungsional Ahli Pertama/Pelaksana (Pengawas disetarakan dalam JF)	Pengawas (yang tidak disetarakan)	Administrator (yang tidak disetarakan)
		Administrator	Kepala Perangkat Daerah/Kepala Biro
2.	Fungsional Terampil, Fungsional Ahli Pertama /Pelaksana (Administrator disetarakan dalam JF)	Administrator (yang tidak disetarakan)	Kepala Perangkat Daerah/Kepala Biro
		Kepala Perangkat Daerah	Asisten
		Kepala Biro	Asisten
3.	Fungsional Ahli Muda	Administrator (yang tidak disetarakan)	Kepala Perangkat Daerah/Kepala Biro
		Kepala Perangkat Daerah/Kepala Biro	Asisten
4.	Fungsional Ahli Madya	Kepala Perangkat Daerah/Kepala Biro	Asisten
		Wakil Direktur	Direktur
5.	Fungsional Ahli Utama	Kepala Perangkat Daerah/Kepala Biro	Asisten
		Direktur	Kepala Perangkat Daerah/Sekda
6.	Kepala Sekolah	Kepala Cabang Dinas	Kepala Perangkat Daerah

Ketentuan ini melengkapi lampiran ketentuan terkait Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai dalam Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur sebelumnya.

Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa penyediaan SKP Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator & Jabatan Fungsional Tertentu yang pejabat penilai dan atasan pejabat penilainya Sekretaris Daerah dan Gubernur Jawa Timur melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur.

Demikian . . .

Demikian untuk menjadi maklum dan atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR



INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670409 199202 2 003



PROGRES PELAPORAN SKP TAHUN 2021
Per tanggal 09 Maret 2022

NO.	OPD	Jumlah PNS	Sudah Lapo	Persentase
1	SEKRETARIAT DAERAH	489	298	60,94
2	SEKRETARIAT DPRD	116	98	84,48
3	DINAS KESEHATAN	6185	5310	85,85
4	DINAS SOSIAL	755	746	98,81
5	DINAS PENDIDIKAN	28417	15432	54,31
6	DINAS PERHUBUNGAN	558	486	87,10
7	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	119	119	100,00
8	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	646	424	65,63
9	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	178	159	89,33
10	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	91	57	62,64
11	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	140	113	80,71
12	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	660	625	94,70
13	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	552	493	89,31
14	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	177	127	71,75
15	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	660	468	70,91
16	DINAS PERKEBUNAN	82	45	54,88
17	DINAS PETERNAKAN	183	116	63,39
18	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	360	353	98,06
19	DINAS KEHUTANAN	601	481	80,03
20	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	250	195	78,00
21	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	86	83	96,51
22	BADAN PENDAPATAN DAERAH	587	449	76,49
23	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	96	79	82,29
24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	136	60	44,12
25	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	105	100	95,24
26	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	61	45	73,77
27	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	74	44	59,46
28	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	175	133	76,00
29	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	68	57	83,82
30	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	104	104	100,00
31	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	66	34	51,52
32	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	150	114	76,00
33	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KEPENDUDUKAN	61	61	100,00
34	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	37	37	100,00
35	INSPEKTORAT PROVINSI	110	24	21,82
36	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	129	82	63,57
37	BADAN KOORDINASI WILAYAH MADIUN	53	39	73,58
38	BADAN KOORDINASI WILAYAH BOJONEGORO	38	38	100,00
39	BADAN KOORDINASI WILAYAH MALANG	37	7	18,92
40	BADAN KOORDINASI WILAYAH PAMEKASAN	25	11	44,00
41	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI	39	38	97,44
42	BADAN KOORDINASI WILAYAH JEMBER	24	24	100,00

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

" Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. "

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



Balai Sertifikasi Elektronik